

ulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solo Pos

Wilayah Berita: Kota Semarang

Halaman 1 dan 7

Parkir Liar Marak, Kebocoran Tinggi

Pengelolaan parkir di Kota Semarang dinilai belum maksimal. Potensi parkir yang besar belum tergarap dengan baik. Kebocoran parkir masih terjadi di mana-mana. Bahkan pada 2017 lalu, realisasi retribusi parkir Kota Semarang

hanya Rp 2,5 miliar. Padahal pendapatan parkir kota-kota besar lainnya sudah di atas Rp 5 miliar.

MALAM minggu, Bambang Cahyono main ke kawasan Simpang Lima, Semarang. Ia memarkir motornya di tepi jalan depan Masjid Raya Baiturrahman. Namun ia mendadak kaget saat juru parkir tepi

jalan menarik uang parkir Rp 5 ribu untuk parkir sepeda motor. "Bayarnya bisa sekarang, Mas. Rp 5 ribu aja," kata jukir sebut saja Eko (nama samaran).

Bambang pun kaget. Sebab, seandainya tarif parkir sepeda motor Rp 1.000 dan mobil Rp 2.000. "Ini sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016," ucapnya.

Saat Bambang menanyakan tarif parkir yang

PENDAPATAN PARKIR KOTA BESAR

Kota Besar	Target 2018	Capaian
Kota Semarang	Rp 15 miliar	Rp 2,5 miliar (capaian 2017)
Kota Surabaya	Rp 40 miliar	
Kota Medan	Rp 43 miliar	Rp 9 miliar (s/d Juli 2018)
Kota Bandung	Rp 115 miliar	Rp 5,6 miliar (s/d Agustus 2018)
Kota Malang	Rp 75 miliar	Rp 5,1 miliar (s/d Juli 2018)
Kota Solo	Rp 4 miliar	Rp 3,5 miliar (capaian 2017)

SIPRI

GRAFIK: IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG

Sambungan dari hal.1

tidak wajar itu, jukir beralasan karena malam minggu. Ia mengaku sudah biasa menarik parkir Rp 5 ribu untuk motor dan Rp 10 ribu untuk mobil. "Soalnya malam Minggu, jadi tarif mahal," kata juru parkir tersebut.

Diakui Bambang, banyak pengunjung yang mengeluhkan besaran tarif parkir yang dinilai mahal tersebut. Apalagi jukir hanya bermodal karcis fotokopian, bertuliskan "Depan Masjid Baiturrahman Semarang, Batas Waktu sampai Jam 24.00." Karcis tersebut tidak ada logo Pemkot Semarang maupun Dishub. "Jelas-jelas liar seperti itu kok nggak ditertibkan ya? Apa Dishub ketetukan karena ada bekangnya? Atau ada setoran khusus?" ujarnya heran.

Hal serupa juga terjadi di Kompleks Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Jalan Sriwijaya Semarang saat ada event rutin yang digelar di tempat tersebut. Tidak sedikit pengunjung yang mengeluhkan sistem penarikan parkir melebihi nominal yang tertera di karcis, yakni sebesar Rp 2 ribu. "Di karcis tertulis Rp 1000, tapi saya ditarik 2 ribu. Saya kaget, terus tukang parkirnya bilang karena sudah malam," kata Yossi, pemuda yang sering menonton event di TBRS.

Parkir di samping Mall Paragon, tepatnya di Jalan Sekayu juga tidak wajar. Tampak deretan sepeda motor tertata rapi, mulai gapura masuk hingga ujung jalan. Jumangin, jukir di kawasan tersebut mengatakan, lahan

sekitar dikelola warga sekitar secara bergantian. Pada Sabtu (15/9) malam, terdapat lima jukir yang kesana-kemari memantau kendaraan. Mereka mematok tarif parkir sepeda motor Rp 3 ribu dan memberikan karcis buatan sendiri yang ditulis pelat nomor motor yang diparkir dengan spidol.

"Kalau parkir di dalam (Mall Paragon) tarifnya Rp 2.500 per jam. Biasanya orang-orang yang ngemall bisa berjam-jam, bisa dikalikan berapa yang harus dibayar sesuai jam kunjung, makanya pada pilih parkir di sini," ujar Jumangin.

Dikatakan, parkir tak resmi itu beroperasi mulai pukul 07.00 pagi hingga 22.00 sesuai jam tutup Mall Paragon. "Lahan ini milik kampung, yang mengurus juga warga kampung sendiri. Kadang banyak orang-orang nongkrong, jadi parkirnya sampai jam 24.00 malam. Sebagian pendapatan parkir masuk kas RT," katanya.

Sunarso mengaku sudah 27 tahun menjadi juru parkir di Jalan MT Haryono, depan Pasar Peterongan. Saat menjadi jukir, ia tidak mesti memberikan karcis kepada pemilik kendaraan. "Soalnya, kadang menolak," ucapnya.

Setiap bendel karcis parkir berisi 100 lembar. Ia biasa membawa ke Pemkot harganya Rp 10 ribu. Area parkir yang dikuasai mulai depan Toko Langganan sampai Toko Sempurna Jalan MT Haryono, Semarang. Dalam sehari, ia bisa mengantongi Rp 70 ribu. Namun jika di musim hujan, pendapatan me-

rosot jadi Rp 25 ribu.

"Setiap harinya, setor ke Dishub Rp 15 ribu, kalau sepi biasanya menyesuaikan. Jumlah hasil tarik parkir kita bagi satu kelompok per shift. Shift pertama dari pukul 08.00 pagi sampai 16.00, shift kedua dari pukul 16.00 sampai pukul 23.00 malam. Kalau kelompok saya ada tujuh orang, dari lampu merah sampai dengan lampu merah. Jadi, hasil bersih setelah bayar ke Dishub kita bagi tujuh orang," bebernya.

Beda lagi dengan jukir Saerozi, 43. Ia mengelola lahan parkir sepanjang kurang lebih 15 meter di depan kantor BRI Pandanaran. Saerozi mengaku lahan parkir itu milik salah seorang anggota Polrestabes Semarang. Bersama dengan rekannya, Jalal, keduanya bekerja mulai pukul 07.00 hingga pukul 16.00.

Dalam sehari, pendapatan yang dikumpulkan bisa fien-capai Rp. 600 ribu, bahkan jika sedang ramai bisa tembus Rp 1 juta. Penghasilan itu dibagi bertiga untuk Saerozi, Jalal, dan pemilik lahan. "Orang parkir di sini, diberi berapapun kita terima sak paawehe, kadang kalau kita dikasih Rp 5 ribu terus dikasih kembalian ndak mau juga ada. Perhari ndak mesti, bisa Rp 500 ribu sampai Rp 600 ribu lebih. Pas ramai bisa sampai Rp 1 juta per hari. "Uang itu nanti kita bagi bertiga dengan pemilik lahan," ujarnya.

Lahan parkir yang menjanjikan secara tidak langsung mengundang preman untuk meminta jatah. Namun dengan surat izin yang sudah dikantongi, banyak

preman mengurungkan niatnya untuk memalak jukir di lahan tersebut. "Ndak ada preman yang berani malak di sini. Kita sudah mengantongi surat izin, jadi aman. Pemah dulu ada yang minta, tapi setelah tahu ada izin, terus punya orang Polrestabes, dia gak berani datang kesini lagi," lanjut pria asal Demak ini.

Saerozi menambal, lahan parkir yang semula dibeli seharga Rp 30 juta itu, sampai saat ini sudah ada yang menawarkan hingga Rp 100 juta. Tempat yang strategis menjadi daya tarik orang untuk membeli lahan tersebut.

"Tujuh tahun lalu pemilik lahan beli cuma Rp 30 juta, sekarang sudah ditawarkan Rp 100 juta, gak dikasih, apalagi lahan parkir di sini hasilnya bisa buat makan sampai anak cucu," ungkapnyanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Pengamat Transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, mengaku prihatin dengan kondisi perparkiran di Kota Semarang. Sebab, pengelolaan pendapatan dari parkir tersebut sangat kacau dan banyak yang dikuasai preman. Tidak hanya itu, bahkan banyak parkir-parkir ilegal yang tarifnya juga tidak sesuai dengan aturan di Kota Semarang. "Potensi par-

kir di Kota Semarang sangat besar, tetapi sayang tidak semuanya masuk Pemkot Semarang," kata Djoko Setijowarno.

Ia menambahkan, kantong-kantong parkir banyak yang tidak resmi dan justru dikuasai preman yang berlagak ormas. Ironisnya, Pemkot Semarang sendiri seakan tidak tegas dan justru membiarkannya. Hal itu jelas membuat parkir di Kota Semarang terus menguap dan tidak bisa dinikmati masyarakat Semarang. Ia bahkan, mengaku beberapa kali melakukan penelitian bersama anggota timnya tentang perparkiran di Kota Semarang.

Hasil penelitian menyebutkan, bila potensi pendapatan parkir di Kota Semarang bisa sampai Rp 150 miliar per tahun. "Teta-pi kenyataannya, pendapatan dari parkir tidak pernah besar. Karena selalu ada kebocoran, dan tidak adanya ketegasan dari Wali Kota Semarang," tegasnya.

Sebagai ibu kota Jateng, harus ada inovasi dan pembenahan perparkiran di Kota Semarang. Penanganan perparkiran yang buruk itu harus direformasi total dan membutuhkan komitmen pemimpin. Penataan juru parkir dan pegawai Dinas Perhubungan (Dihub) yang beker-

ja di lapangan harus dilakukan. "Pemkot harus merombak total pengelolaan parkir. Selama ini, yang diutamakan hanya pihak ketiga dan pemkot yang dirugikan," tambahnya.

Djoko juga menyorot pengelolaan parkir yang masih dilakukan dengan cara konvensional. Harusnya, ada pembaharuan dengan menggunakan sistem berbasis Informasi Teknologi (IT) untuk menjamin transparansi dan agar pendapatan tidak bocor. Sistem IT bisa menjadi salah satu cara untuk mengontrol terhadap pengelolaan perparkiran agar menjadi lebih efektif.

"Pengelolaan (retribusi parkir) dengan IT juga bisa mencegah kebocoran, sehingga bisa menambah pemasukan maksimal bagi pendapatan asli daerah (PAD). Dan itu harus segera dilakukan, agar masyarakat tidak dirugikan, sudah membayar parkir tapi tidak bisa menikmati hasilnya," tambahnya.

Asisten Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah, Sabarudin Hulu saat dikonfirmasi terkait masalah karut marut perparkiran di Kota Semarang, untuk tahun ini, lembaganya belum menerima aduan maupun laporan masyarakat. Namun demikian,

pada 2015, pernah ada keluhan terkait masalah parkir, yakni soal tidak diberikan karcis, dan tarif yang tidak sesuai Perda Kota Semarang.

"Kami belum melakukan investigasi soal parkir liar di Semarang. Kami imbau kepada masyarakat, apabila tarif parkir tidak sesuai dengan Perda Kota Semarang, dan masyarakat merasa diperas oleh pihak yang memungut tarif parkir karena tidak ada karcis, agar dapat mempidanakan. Bagaimanapun perbuatan tersebut dapat dikategorikan tindak pidana, yakni pemerasan," tegas Kepala Perwakilan ORI Jateng Acim Dar-tasim, melalui Asistennya, Sabarudin Hulu, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (16/9).

Diakui, ada organisasi yang membekingi parkir liar, maka pihaknya mendorong kepada Wali Kota Semarang agar meminta Dinas Perhubungan melakukan evaluasi dan penertiban parkir liar bersama Satpol PP dan Polrestabes Semarang. Kemudian mengevaluasi pendapatan yang bersumber dari parkir, apakah sudah sesuai target atau tidak. (mg9/mg11/mg12/mg14/mg10/mg13/ftb/jks/aro)